

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR : 7
TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**

(Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo)

TESIS



Oleh :

ROCHMAN REFAYA BARUS

NPM. 041801030

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR : 7
TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**

(Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo)

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh :
ROCHMAN REFAYA BARUS
NPM. 041801030

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR : 7
TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**

(Studi Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo)

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area**



Oleh :
ROCHMAN REFAYA BARUS
NPM. 041801030

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 7**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

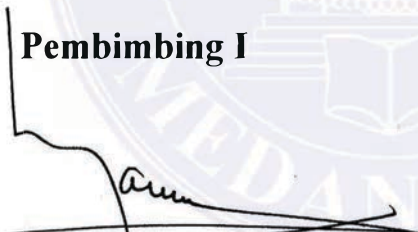
J u d u l : IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR : 7
TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Studi Pada Dinas
Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo)

N a m a : ROCHMAN REFAYA BARUS

N I M : 041801030

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Usman Tarigan, MS

Pembimbing II



Drs. Kariono, MA

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur



Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dengan judul Tesis **“Implementasi Instruksi Presiden No. 7 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo”**

Tesis ini dapat diselesaikan tepat dengan waktunya atas dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. , Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, Direktur PPs Magister Administrasi Publik
3. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS, sebagai Pembimbing I
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Program Studi,
5. Isrtriku terkasih Pt. Dr. Lidia Melanita Weko, MM dan putra putriku tersayang Raja Basthian Malem Ate Barus, S. Kom, Refdiani Caroline Barus serta semua keluarga yang telah dengan sabar memberikan dorongan semangat serta tidak pernah putus mengalirkan do'a, berkorban materil yang tak terhitung demi keberhasilan dan kesuksesan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf administrasi PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

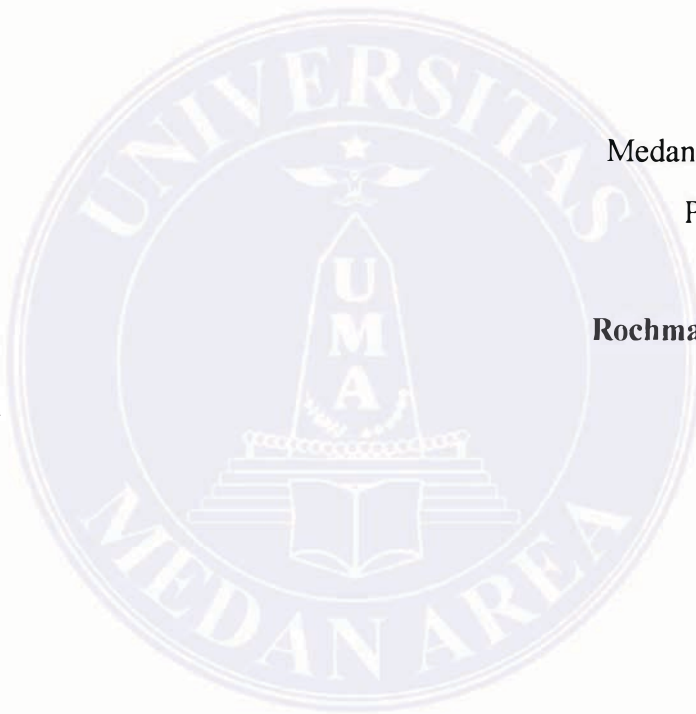
7. Semua pihak yang telah membantu penulis mulai dari penulis duduk di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang namanya tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua pengorbanan mereka yang telah dilimpahkan kepada penulis mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini bermanfa'at bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang membutuhkan data tentang AKIP di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo.

Medan, Januari 2007

Penulis,

Rochman Refaya Barus



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iii
INTISARI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Pikir	9
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	13
2.2. Implementasi	16
2.3. Model Komunikasi Program	18
2.4. Prinsip Akuntabilitas : Definisi, Indikator dan Alat Ukur	23
2.5. Kinerja Lembaga	31
2.5.1. Pengertian Kinerja	31
2.5.2. Indikator Kinerja	33
2.5.3. Pengukuran/Penilaian Kinerja	34
2.5.4. Makna dan Hakikat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	46
2.5.5. Kegunaan atau Manfaat Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan	49

2.5.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja	51
2.5.7. Pencapaian Kinerja	53
2.6. Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	54
2.6.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	55
2.6.2. Prinsip-Prinsip Penyusunan LAKIP	63
2.6.3. Format LAKIP	64

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian.....	66
3.2. Lokasi Penelitian	67
3.3. populasi Sampel.....	67
3.4. Rencana Sampling	67
3.5. Teknik Pengumpulan Data dan Pengukurannya	68
3.6. Operasionalisasi Variabel.....	69
3.7. Tenik Analisa Data	71
2.7.1. Metoda	71

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Karo.....	73
4.2. Potensi Pembangunan	74
4.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	75

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1. Hasil Penelitian	79
5.1.1. Karakteristik Responden	79
5.1.2. Variabel Penelitian.....	81
5.2. Analisa Data.....	82

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	84
6.2. Saran - Saran	85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN..... 87

INTISARI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana: (1). Kinerja organisasi di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo ; (2). Sejauh mana Inpres No. 7 Tahun 1999 mempengaruhi kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo. Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (natural) dimana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci .

Hasil penelitian berdasarkan jumlah responden dan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebahagian besar (61,54 persen) responden menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang adanya Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, sedangkan yang kurang mengetahui sebesar 23,08 persen dan tidak ada seorang responden pun yang menyatakan tidak mengetahui. Hal ini berarti bahwa secara umum aparat yang terkait dengan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 telah mengetahui adanya program pemerintah yang berkaitan peningkatan kualitas pekerja di instansi tersebut.

Implementasi Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerja Staf di lingkungan Instansi Pemerintah di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karo termasuk dalam kategori baik dalam arti bahwa Peningkatan Kualitas Kerja Staf di kantor tersebut telah berjalan efektif atau berhasil sebagaimana diharapkan, dan peningkatan kinerja juga sangat baik. Hambatan utama yang masih ditemukan dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kerja adalah : (1). Belum memiliki sasaran stratejik yang spesifik, jelas dan terukur ; (2). Belum memiliki secara formal ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran stratejiknya ; (3). Belum secara terbuka menetapkan target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal ; (4). Belum terdapatnya sistem pengumpulan data kinerja.

Key words : *kinerja organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi.*

ABSTRACT

Governmental Akuntabilitas Institution Performance of obligation materialization of governmental institution to justify of success and organizational mission execution failure in reaching target which have been specified with the responsibility system periodical. System of Akuntabilitas performance institution in fulfilling obligation to justify the and success failure in organizational mission execution. Consist of various components which as one unity, that is strategy planning, performance planning, performance measurement, and performance reporting.

This research aim to know how : (1). Organizational performance on social duty, labour and transmigration of Karo Sub-Province ; (2). How far Inpres No. 7th 1999 influencing performance on social duty, labour and transmigration of Karo Sub-Province. Method used at this research is as the research qualitative. Method qualitative is research methos used to check at natural condition object where research function as key instrument.

Result of research according to amount of responder and level education indicate that major (61,54%) responder express that they know about the existence of instruction of Presiden No. 7th 1999, while less knowing equal to 23,08% and no aresponder even who expressing not know. This matter means that in generally government officer which is related to Instruction of Presiden No. 7th 1999 about Akuntabilitas Institution Performance Governmental Institution order to make-up of quality of staff in enviroment of Governmental in social duty, labour and transmigration of Karo Sub-Province is included in good category in the meaning that make-up of job quality of staff in the office have walked effective or succeed as expected, and make-up of performance also very good. Especial resistance which is still found in order to make-up of quality of job are : (1) Not yet owned formally size target strategic, clear and measured ; (2). Not yet owned formally size measure organizational efficacy in reaching target its strategic ; (3) Not yet openly specify the target performance as commitment form of organizational to optimal performance attainment ; (4) Not yet designed of system of data collecting performance.

Keywords : organization performance, leadership, organization culture.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan program kegiatan instansi pemerintah, perlu suatu akuntabilitas, sehingga transparansi kinerja pemerintah dapat terwujud, yang dapat mendukung pelaksanaan *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu

perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah, maka diperlukan beberapa langkah, diantaranya saja adalah penetapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, serta pengukuran kinerja.

Sedang fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua perkembangan diatas, baik demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang seba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Disadari, mewujudkan tata pemerintahan yang baik membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus. Disamping itu, perlu juga dibangun kesepakatan serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara, yaitu para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat madani untuk menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asian Development Bank, 1999. *Governance Sound Development Management* (1999), hal 7-13)
- Asian Development Bank, "Public Administration in the 21-st Century" (artikel di Internet)
- Bintoro Tjokroamidjojo, (2001), "*Reformasi Administrasi Publik*", Jakarta: MIA-UNKRIS hal 45-49
- Budiarjo Miriam, 2000, *Menggapai kedaulatan untuk Rakyat*, Bandung
- Dunn, William N., 1999, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 1990
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, new jersey: Princetown University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1993. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: GunungAgung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* dalam *Administration and Society* 6, 1975, London: Sage.

- Nugroho D, Riant, 2003. ***Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi***. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, ***Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector***, New York: Plume Book.
- Republk Indonesia, 1992. ***Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman***. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 1999. ***Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah***. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Republk Indonesia, 2000. ***Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Taentang Program Pembangunan Nasuional (PROPENAS) Tahun 2000-2004***. Jakarta : CV. Tamita Utama.
- Sugiyono, 1998. ***Metode Penelitian Administrasi***, Bandung : Alfabeta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, ***"Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan"***, Jakarta, 20 Juni 2000, kertas kerja.
- Toha, Miftah, 1991 (1987), ***Perspektif Perilaku Birokrasi***. Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, ***Governance, Administration, and Development***, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002, ***Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara***, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawa, Samudra, 1994. ***Evaluasi Kebijakan Publik***. Jakarta : Raja Grafindo Persada,